

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 1148/MENKES/PER/VI/2011 TENTANG  
PEDAGANG BESAR FARMASI PADA PT. KIMIA FARMA TBK  
CABANG PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 31 AYAT 2 )**

**OLEH :**

**AGUS SAPUTRA**

**Administrasi Publik**

**Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara**

---

***ABSTRACT***

*This study examines the implementation of Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 1148/Menkes/Per/VI/2011 concerning Pharmaceutical Wholesalers at PT Kimia Farma Tbk Palembang Branch, specifically Article 31 Paragraph 2 regarding guidance and supervision. The objective of this research is to analyze the extent to which the regulation has been implemented in terms of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, as well as to assess the company's role in ensuring the availability, equitable distribution, and affordability of medicines, while protecting the public from the use of drugs that do not meet quality, safety, and efficacy standards. This research applied a qualitative approach with data collected through interviews, observation, and documentation. Data were analyzed descriptively using the Miles, Huberman, and Saldana model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the Ministerial Regulation at PT Kimia Farma Tbk Palembang Branch has been relatively effective. This is reflected in well-established communication among employees, adequate human resources and facilities despite the shortage of sales personnel, cooperative disposition of employees in executing policies, and a bureaucratic structure aligned with the division of tasks and functions. Moreover, the company actively carries out guidance and supervision by reminding the public about the dangers of using*

*drugs that do not comply with standards. The study concludes that the implementation of the regulation is in accordance with the provisions, although improvements are needed in distribution and the addition of sales staff to support operational effectiveness.*

**Keywords:** *Policy implementation, Pharmaceutical Wholesalers, PT Kimia Farma, Minister of Health Regulation 1148/Menkes/Per/VI/2011, Palembang.*

---

## **A. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan industri yang semakin pesat menuntut setiap organisasi untuk mampu bersaing di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Dalam konteks layanan kesehatan, perbekalan farmasi menjadi elemen penting karena sebagian besar tindakan medis bergantung pada ketersediaannya. Namun, masih terdapat kecenderungan masyarakat yang lebih memilih obat bermerek dibandingkan generik, serta penyimpanan obat cair yang tidak tepat sehingga berisiko bagi kesehatan.

Manajemen obat yang mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi menjadi krusial untuk memastikan ketersediaan obat dalam jumlah dan

jenis yang tepat, serta menjaga kualitas, keamanan, dan keterjangkauan. Pedagang Besar Farmasi (PBF) berperan penting dalam rantai distribusi ini, termasuk PT Kimia Farma Tbk sebagai perusahaan distribusi farmasi terbesar di Indonesia.

Untuk menjamin kualitas dan keamanan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi. Regulasi ini mengatur pembinaan dan pengawasan agar distribusi obat berjalan merata, terjangkau, dan aman digunakan masyarakat. PT Kimia Farma Tbk Cabang Palembang telah melaksanakan aturan ini dengan memperoleh izin resmi dan menerapkan standar distribusi obat. Namun, hasil

observasi menunjukkan masih terdapat kendala berupa kekurangan tenaga sales yang berdampak pada kelancaran distribusi obat.

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul: “Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pada PT Kimia Farma Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 31 Ayat 2).”

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148 /Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 31 Ayat 2) ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Permenkes RI Nomor

1148 /Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 31 Ayat 2).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

#### **a. Bagi Penulis**

Untuk hasil penelitian ini salah satu hasil pemikiran bagi para akademis dalam mengembangkan pengetahuan wawasan dan informasi khususnya bagi yang berhubungan dengan Administrasi Publik mengenai Implementasi Di Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang.

#### **b. Bagi Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang**

Hasil penelitian ini sebagai masukan dalam usaha meningkatkan prestasi, kualitas dan mutu kerja pegawai.

#### **c. Bagi Pembaca atau Umum**

Sebagai acuan dalam penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi.

## **B. METODOLOGI PENELITIAN**

### **2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan implementasi kebijakan yang lebih menekankan pada makna daripada generalisasi

### **2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di PT Kimia Farma Tbk Cabang Palembang dengan waktu pelaksanaan penelitian pada tahun 2025 sesuai jadwal yang telah ditetapkan peneliti.

### **2.3 Informan Penelitian**

Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan terdiri dari 6 orang, yaitu: 1 Branch Manager, 1 Supervisor Penjualan, 1 Staff Logistik Barang Masuk, 1 perwakilan BPOM, serta 2 orang salesman.

### **2.4 Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan berupa:

- a. Data primer: diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung.

- b. Data sekunder: diperoleh melalui studi pustaka, arsip, laporan, serta referensi lain yang relevan.

### **2.5 Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui:

- a. Observasi terhadap kegiatan distribusi dan implementasi regulasi.
- b. Wawancara mendalam dengan informan kunci.
- c. Dokumentasi berupa arsip, foto, dan dokumen resmi.
- d. Studi pustaka dari literatur terkait

### **2.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup:

- a. Reduksi data (menyaring dan menyederhanakan data).
- b. Penyajian data (narasi, tabel, dan bagan).
- c. Penarikan kesimpulan yang dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga data jenuh.

### **2.7 Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan dilakukan melalui kriteria kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Teknik yang digunakan antara lain: triangulasi

sumber, membandingkan data dari berbagai sumber, serta menguji data menggunakan kerangka teori.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Hasil Penelitian**

#### **3.1.1 Implementasi**

##### **a. Komunikasi**

Seluruh informan menyampaikan bahwa komunikasi di PT Kimia Farma Tbk Cabang Palembang berjalan baik melalui rapat koordinasi dan sosialisasi internal. Branch Manager menjelaskan bahwa rapat internal rutin diadakan untuk memastikan Peraturan Menteri Kesehatan No. 1148/Menkes/Per/VI/2011 dapat diterapkan dengan tepat. Hal ini diperkuat oleh Supervisor Penjualan, Staff Logistik, BPOM, serta para salesman yang menyatakan bahwa penyampaian informasi dilakukan secara jelas, konsisten, dan selalu menekankan maksud serta tujuan regulasi. Dengan demikian, aspek komunikasi dinilai sudah efektif dalam mendukung implementasi kebijakan.

##### **b. Sumber Daya**

Mayoritas informan mengakui bahwa ketersediaan sumber daya

manusia, khususnya tenaga sales, masih menjadi kendala utama dalam kelancaran distribusi obat. Branch Manager dan Supervisor Penjualan menekankan bahwa tenaga sales yang terbatas sering menghambat distribusi. Staff Logistik dan BPOM juga menambahkan bahwa hambatan distribusi disebabkan oleh kekurangan tenaga lapangan. Para salesman pun merasakan beban kerja yang tinggi akibat kurangnya personel. Meski demikian, fasilitas pendukung seperti kendaraan, komputer, gudang, serta peralatan logistik sudah cukup memadai. Kesimpulannya, secara umum sumber daya di PT Kimia Farma mencukupi, namun jumlah tenaga sales perlu ditingkatkan untuk memperlancar distribusi.

##### **c. Disposisi**

Sikap dan penerimaan pegawai terhadap regulasi dinilai sangat positif. Branch Manager, Supervisor Penjualan, Staff Logistik, BPOM, dan para salesman sepakat bahwa seluruh pegawai kooperatif, menerima, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Pegawai menunjukkan komitmen, kejujuran, dan kesediaan

untuk melaksanakan aturan sesuai tujuan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor disposisi mendukung implementasi kebijakan karena para pelaksana memiliki sikap yang sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Informan menjelaskan bahwa struktur birokrasi di PT Kimia Farma Tbk Cabang Palembang telah disusun dengan jelas melalui *standard operating procedures* (SOP) dan pembagian tugas pokok serta fungsi (tupoksi) yang sesuai kompetensi. Branch Manager menekankan pentingnya SOP sebagai pedoman pelaksanaan, sementara Supervisor Penjualan dan Staff Logistik menambahkan bahwa prosedur yang jelas mampu mengatasi hambatan birokrasi yang rumit. BPOM juga mendukung bahwa dengan adanya tupoksi, pengawasan lebih mudah dilakukan. Para salesman menegaskan bahwa pembagian tugas yang sesuai membuat pekerjaan lebih efektif tanpa terjadi tumpang tindih jabatan. Dengan demikian, struktur birokrasi

dinilai sudah berjalan baik dan mendukung implementasi kebijakan

#### **3.1.2 Pembinaan dan Pengawasan**

##### **a. Menjamin Ketersediaan, Pemerataan, dan Keterjangkauan Obat**

Para informan menegaskan bahwa PT Kimia Farma Tbk Cabang Palembang selalu berupaya menjaga ketersediaan obat melalui manajemen pengelolaan yang baik. Branch Manager menekankan bahwa dana pengadaan dan operasional selalu dijaga agar distribusi obat berjalan lancar. Supervisor Penjualan menambahkan bahwa perusahaan membentuk manajemen organisasi agar distribusi tepat waktu dan tidak mengecewakan agen. Staff Logistik menjelaskan adanya tim penanggung jawab yang dibentuk untuk memastikan distribusi berjalan sesuai rencana. Hal ini juga didukung oleh BPOM yang menekankan pentingnya komitmen tim serta kecukupan SDM. Para salesman menegaskan bahwa distribusi dilaksanakan dengan memperhatikan kendala di lapangan, menggunakan sistem informasi, serta kerja tim yang solid. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

PT Kimia Farma berusaha menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dengan membangun manajemen yang terstruktur dan berorientasi pada ketepatan waktu distribusi.

#### **b. Melindungi Masyarakat dari Bahaya Penggunaan Obat yang Tidak Tepat**

Informan sepakat bahwa perlindungan masyarakat menjadi prioritas utama. Branch Manager menjelaskan bahwa Kimia Farma selalu mengingatkan masyarakat tentang bahaya penggunaan obat yang salah atau tidak sesuai aturan. Supervisor Penjualan menambahkan bahwa pegawai aktif menyosialisasikan risiko kesehatan akibat penggunaan obat yang tidak tepat. Staff Logistik menegaskan bahwa penyalahgunaan obat bahkan bisa berakibat fatal hingga kematian, sehingga pengingat kepada masyarakat sangat diperlukan. BPOM juga berperan langsung dalam memberikan perlindungan dengan mengawasi serta mengingatkan masyarakat. Para salesman menyampaikan pesan yang sama, bahwa penggunaan obat yang

salah dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan. Dari seluruh keterangan, terlihat bahwa Kimia Farma tidak hanya berfokus pada distribusi, tetapi juga menjalankan fungsi edukatif dan preventif untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

### **3.2 Pembahasan**

#### **3.2.1 Implementasi**

Dalam pandangan George Edward III dalam Widodo 2011:97, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi. Keempat variable tersebut juga saling berhubungan satu sama lain, sebagai berikut :

##### **a. Komunikasi**

Menurut Edward III Komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur

keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu transmisi, kejelasan informasi serta, konsistensi informasi yang disampaikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penyaluran komunikasi melalui rapat dan sosialisasi, informasi yang di terima sudah cukup jelas dan konsisten yang sampai saat ini tetap dilaksanakan.

Komunikasi merupakan suatu proses penyampain informasi yang dilakukan di PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang yang dilakukan dengan cara rapat koordinasi dimana penyaluran komunikasi sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan teori George Edward III dalam Widodo (2011:97)

#### **b. Sumber Daya**

Menurut Edward III dalam Winarno (2004:168) Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi

implementor dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif serta sumber daya fasilitas yakni sumber daya pendukung kelancaran dari proses implementasi. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Berdasarkan hasil penelitian di atas didapat bahwa kesiapan Sumber Daya Manusia didalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148 /Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang masih mengalami kekurangan pada tenaga sales sehingga dalam proses pendistribusian sering mengalami keterlambatan.

Sumber Daya merupakan faktor yang sangat penting dalam melaksanakan suatu kebijakan pada PT Kimia Farma Cabang Palembang terutama sumber daya manusia masih terdapat kekurangan terutama pada tenaga sales sehingga kurang terlaksana dengan baik sehingga

tidak sesuai dengan teori George Edward III dalam Widodo (2011:97)

### **c. Disposisi**

Menurut Edward III Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dan rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa disposisi sudah dijalankan sebagai pelaksana ketentuan yang mana mendukung para pegawai untuk

lebih memahami lagi dalam mengemban tugas yang diberikan oleh PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang.

Disposisi dari pelaksana kebijakan merupakan faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Jika para pelaksana melakukan sikap baik dalam kebijakan, seperti halnya mendukung suatu kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan dengan baik sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan teori George Edward III dalam Widodo (2011:97)

### **d. Struktur Birokrasi**

Menurut Edward III Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi yang *standard operating procedures* (SOP). SOP menjadi pedoman setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu Panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan

menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi sudah dijalankan sebagai pelaksana ketentuan yang mana mendukung para pegawai untuk lebih memahami lagi tentang peraturan yang telah diberlakukan di PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang.

Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan dapat mempermudah berlangsungnya proses koordinasi, pelaporan, dan pengendalian. Siapa bertanggung jawab apa. Siapa harus bertanggungjawab dan melapor kepada siapa, dan sebaliknya kepada siapa harus meminta laporan dan tanggungjawab telah terlaksana dengan baik sesuai dengan teori George Edward III dalam Widodo (2011:97).

### **3.2.2 Pembinaan dan Pengawasan**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011

Tentang Pedagang Besar Farmasi Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 31 Ayat 2 )

#### **a. Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan bahan obat untuk pelayanan kesehatan**

Untuk menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, diperlukan manajemen pengelolaan obat yang baik meliputi tahap seleksi, pengadaan, distribusi dan penggunaan, serta didukung oleh pendukung manajemen yang meliputi manajemen organisasi, ketersediaan dana pengadaan obat dan operasional lainnya, penanggung jawab, jumlah SDM dan sistem informasi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas di Kantor PT.Kimia Farma Cabang Palembang memberikan jaminan atas ketersediaan obat serta memastikan pendistribusian obat sampai kepada konsumen tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat

dan bahan obat untuk pelayanan kesehatan bahwa PT.Kimia Farma Cabang Palembang berkewajiban untuk menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan produk farmasi obat kesehatan bagi masyarakat ini telah dilakukan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148 /Menkes/Per/VI/2011

**b. Melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat atau bahan obat yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan**

Masyarakat dapat berperanserta dalam mewujudkan perlindungan dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi standar

Berdasarkan hasil penelitian di atas di Kantor PT.Kimia Farma selalu melindungi serta mengingatkan kepada msyarakat agar menghindari penggunaan obat yang tidak sesuai dengan petunjuk serta aturan yang ada.

Melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat atau bahan obat yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh PT Kimia Farma Cabang Palembang ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148 /Menkes/Per/VI/2011

**3.2.3 Hubungan Implementasi dan Pembinaan Pengawasan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas di Kantor PT.Kimia Farma tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148 /Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang bahwa memiliki Hubungan antara Implementasi dengan Pembinaan dan Pengawasan proses pelaksanaan peraturan yang telah di patuhi oleh setiap pegawai di PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 1148 /Menkes/Per/VI/2011 Hubungan Implementasi dan Pembinaan Pengawasan merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara proporsional dan dalam rangka pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148 /Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang (Studi Kasus Pasal 31 Ayat 2 ) Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang Tentang Pembinaan dan Pengawasan sudah terlaksana dengan baik terdiri dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Struktur Birokrasi, akan tetapi di indikator sumber daya manusia pada bidang tenaga sales perlu penambahan karena dirasa masih kurang dalam pendistribusian obat.

##### **4.2 Saran**

Berdasarkan Kesimpulan yang di peroleh dari hasil penelitian diatas,maka peneliti memberikan saran yang dapat di jadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang hendaknya dalam Pengimplementasian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148 /Menkes/Per/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi Pada PT. Kimia Farma Tbk Cabang Palembang hendaknya dapat menambah sumber daya manusia agar pendistribusian obat dilapangan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anief M., 2006, Ilmu Meracik Obat. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Agustino, Leo. 2011. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
- Budiardjo, Miriam. 2012. Kebijakan Implementasi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Donald Van Metter dan Carl Van Hom, 2012, Model-model dalam Kebijakan Implementasi, yongyakarta
- Edwards III, George.(2003). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Lukman Offset
- Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2012 Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara
- Nugroho D, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta : Gramedia
- Nursalam, 2007 Metodologi Penelitian Keperawatan. Edisi Ketiga Jakarta : Salemba Medika
- Simanjuntak, B. dan Pasaribu, I.L. 2010. Pengantar Psikologi Perkembangan. Bandung: Tarsito
- Sambara, J., 2007, Pola Penggunaan Obat Generik Berlogo Dari Rumah sakit Umum Daerah Kupang Periode Juli-Desember 2006, (<http://www.Medicastore.com>)
- Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tahir, 2014 Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah, Bandung, ALFABETA
- Tachjan. 2006 Implementasi Kebijakan Publik, Aipi Puslit KP2W Lemlit UNPAD, Bandung
- Thoha, Miftah, 2019. Kepemimpinan Dalam Manajemen, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Grasindo: Jakarta
- Widodo, 2018 Hasil Implementasi Penilaian Universitas Pendidikan Indonesia
- Peraturan Undang-Undang**

- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Peraturan Menteri Indonesia Republik Kesehatan NOMOR HK.02.02/MENKES/068/1/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah
- Peraturan Jurnal Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi. 2011. Jakarta: Menteri Kesehatan.
- Jurnal**
- Ayu Juniandani. 2017. Analisis Strategi Pemasaran alat kesehatan pada PT. Rayhan Alkesindo Makassar <http://repository.uinsu.ac.id/4937/4>
- Nur Aminah. 2018. Analisis Kebijakan Saluran Distribusi Dan Promosi Alat Kesehatan Pada PT. Panasea Banjarmasin Kalimantan Selatan
- Yan Hendrika, Mona Asiah, Ovalina Asiah, Ovalina Sylvia Br. Ginting 2022.(Pdf) <https://www.researchgate.net/publication/366969335>
- Monitoring Dan Evaluasi Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (Cdakb) Pada Pedagang Alat Kesehatan Pt.X Di Kota Batam